

**PARTISIPASI PENDUDUK DALAM BIDANG PENDIDIKAN
DI KECAMATAN BLANAKAN KABUPATEN SUBANG**
(Kajian Perbandingan Antara Penduduk Asli dan Pendatang)

Oleh: Asep Mulyadi*)

ABSTRAK

Pembangunan dibidang pendidikan merupakan upaya yang ditempuh dalam rangka memperoleh manusia berkualitas. Keberhasilan pembangunan nasional sangatlah tergantung pada kemampuan bangsa yang bersangkutan untuk mengoptimalkan sumberdaya manusia yang dimiliki. Melalui proses pendidikan diharapkan kebutuhan akan sumberdaya manusia berkualitas dapat terpenuhi, sehingga pendidikan menjadi prasyarat utama dalam menopang keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Keberhasilan dalam pembangunan pendidikan sangatlah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta peranan pemerintah. Di samping budaya yang masih belum mendukung, faktor ekonomi ternyata masih merupakan faktor dominan bagi masyarakat di kecamatan Blanakan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Faktor-faktor tersebut menjadi sedikit berbeda ketika membandingkan antara masyarakat atau penduduk "asli" dan pendatang. Masyarakat pendatang lebih memiliki motivasi tinggi dalam berpartisipasi di bidang pendidikan anak-anak mereka, dibandingkan dengan penduduk asli. Latar belakang pendidikan, pendapatan, dan jenis pekerjaan cukup berhubungan erat dengan rata-rata tingkat partisipasi dalam bidang pendidikan anak-anak mereka di semua jenjang, tetapi sikap atau pandangan hidup mereka sebagai pendatang yang ingin selalu eksis di tempat mereka tinggal, lebih dominan sebagai faktor yang menempatkan pendidikan memiliki nilai penting dalam kehidupannya.

Kata Kunci: Partisipasi, pendidikan.

*) Drs. Asep Mulyadi, M.Pd., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI .

1. Pendahuluan

Kerangka pendekatan pembangunan nasional Indonesia saat ini nampak mulai bergeser dari paradigma pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, iptek dan berorientasi politik, kepada pembangunan manusia. Paradigma dengan titik berat bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, iptek dan politik ternyata telah gagal menjawab berbagai tantangan dan masalah umat manusia seperti kemiskinan, keterbelakangan, kerusakan lingkungan dan masalah moral. Hal ini terjadi karena paradigma pembangunan tersebut telah mengabaikan pembangunan manusia sebagai pusat dan titik pembangunan. Karena itu, sudah saatnya titik berat pembangunan sekarang ditentukan atau bertumpu pada pembangunan manusia.

United Nation Development Program (UNDP) telah mengembangkan parameter pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia dengan menentukan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun berdasarkan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli. Tiga variabel tersebut cukup signifikan kontribusinya terhadap peningkatan IPM, karena langsung berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan laporan UNDP tahun 2002, IPM Indonesia secara nasional, regional (provinsi), maupun lokal (kabupaten/kota) berada pada kondisi yang memprihatinkan. Untuk tingkat nasional, Indonesia berada pada urutan 110 dari 173 negara-negara miskin dan berkembang di dunia. Posisi tersebut berada di bawah Vietnam yang menempati urutan ke 109 dan tertinggal jauh dengan Singapura di urutan ke 25, Brunei ke 32, Malaysia ke 54 dan Thailand ke 70.

Pada lingkup regional, IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 1999 sebesar 65,6 dan berada di urutan ke 15. Angka tersebut turun jika dibandingkan tahun 1966 sebesar 68,2 yang berada di urutan ke 14. Pada tahun 2004 dan 2005 ternyata Jawa Barat masih relatif rendah yakni sebesar 73,5 dan 74,5. Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Subang ternyata memiliki IPM terendah di provinsi Jawa Barat, bersama kabupaten Indramayu, Cirebon, Garut dan Majalengka.

Sejak tahun 1999 IPM Kabupaten Subang sesungguhnya menunjukkan kenaikan, yaitu 63,1 tahun 1999 menjadi 65,64 di tahun 2000 dan naik lagi menjadi 66,65 tahun 2002. Namun demikian, kenaikan tersebut tidak jauh berbeda dengan IPM Jawa Barat. Berikut ini dapat diamati rangking IPM kabupaten/kota se Jawa Barat dibandingkan dengan kabupaten/kota se Indonesia.

Tabel 1. Rangkings IPM kabupaten/kota se-Jawa Barat

No	Terendah	Ranking	Tertinggi	Ranking
1	Indramayu	269	Kota Bandung	20
2	Karawang	237	Kota Bogor	29
3	Cirebon	227	Kota Bekasi	43
4	Garut	223	Kota Sukabumi	49
5	Majalengka	192	Kota Cirebon	55
6	Subang	182	Kota Sumedang	79

Sumber : Indonesia HDI Report, 2001.

Aspek pendidikan sebagai salah satu komponen dalam IPM, merupakan variabel yang memiliki kontribusi cukup signifikan. Variabel ini dapat merupakan dasar pendukung bagi pengembangan aspek-aspek lainnya dalam IPM. Indikator pendidikan yang langsung berpengaruh terhadap peningkatan IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Peningkatan AMH dan RLS ini akan langsung dipengaruhi oleh angka Partisipasi Sekolah (APK) tingkat SD, SMP dan SMA. Rendahnya angka IPM Subang dari indeks pendidikan lebih disebabkan oleh angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang rendah.

Tabel 2. IPM Kabupaten Subang tahun 2004

Komponen	%
Angka Harapan Hidup (AHH)	66,54
Angka Melek Huruf (AMH)	88,28
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,86
Purchasing Power Parity (PPP)	570,450
IPM	69,53

Sumber Data : Sensus LPM UPI 2004.

Untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APK) mutlak diperlukan faktor-faktor pendukung seperti jumlah dan kualifikasi guru, kurikulum, buku pelajaran, sarana prasarana, dan faktor lain yang memiliki keterkaitan kuat dengan peningkatan indeks pendidikan seperti: kemiskinan, anggaran pendidikan, budaya masyarakat dan motivasi masyarakat untuk berkembang.

Luasnya masalah yang berpengaruh pada indeks pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, banyak pula variabel yang dapat diidentifikasi. Penelitian ini berusaha mengungkap salah satu faktor yang berpengaruh, terutama ingin melihat bagaimana karakteristik masyarakat kabupaten Subang, khususnya di Kecamatan Blanakan yang memiliki karakteristik cukup prular dalam sosial dan budaya berpengaruh pada upaya-upaya peningkatan di bidang pendidikan. Dalam

kesempatan ini, peneliti mencoba memusatkan perhatian pada bagaimana budaya dan motivasi masyarakat khususnya keluarga-keluarga pada masyarakat "asli" dan "pendatang " di Desa Blanakan sebagai desa sampel penelitian, dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Untuk lebih memperjelas permasalahan di atas maka diajukan rumusan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kondisi pendidikan penduduk di Desa Blanakan ?
- b. Apakah ada perbedaan tingkat partisipasi pendidikan antara penduduk asli dan pendatang di Desa Blanakan ?
- c. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pendidikan antara penduduk asli dan pendatang di Desa Blanakan ?

2. Pembangunan Pendidikan di Pedesaan

Keberhasilan pembangunan nasional sangatlah tergantung dari kemampuan bangsa yang bersangkutan untuk mengoptimalkan sumberdaya manusia yang dimiliki. Untuk memperoleh manusia yang berkualitas dapat ditempuh melalui proses pendidikan. Karena itu, pendidikan menjadi prasyarat yang harus diutamakan dalam bidang pembangunan. Partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan juga harus lebih ditingkatkan lagi dan perlu mendapat perhatian besar dari pemerintah.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai dekade keenam, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan terutama di pedesaan masih rendah. Hal ini diduga sebagian besar masyarakat belum menyadari arti pentingnya pendidikan atau pun adanya faktor lain seperti kondisi sosial ekonomi yang membatasi keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

Desa sering didentikan dengan kemiskinan. Namun demikian, kemiskinan di pedesaan berbeda dengan kemiskinan di kota. Tingkat kemakmuran di desa umumnya rendah. Indikasi tersebut dapat kita kenali dengan sedikitnya rumah dengan kondisi yang baik. Bersamaan dengan standar yang rendah tersebut, pelayanan masyarakat pun menjadi rendah pula dibanding dengan pelayanan masyarakat di kota. Dunia pedesaan dalam bentuk sekarang ini merupakan hasil proses sejarah dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang. Harus segera diambil tindakan pencegahan untuk menjaga agar masyarakat tidak mengalami penderitaan sebagai akibat kebijaksanaan ekonomi dan sistem pendidikan yang dewasa ini nampak berpihak, tetapi belum memberikan keuntungan pada pedesaan.

Seperti apa pembangunan pendidikan di pedesaan sebaiknya dikembangkan? Di pedesaan, lebih-lebih pada desa-desa yang tergolong sebagai daerah tertinggal, tidak sedikit kasus murid meninggalkan sekolah ketika musim

panen tiba, berhenti sekolah sebelum SD atau SMP terselesaikan, atau banyak anak-anak usia sekolah tidak berada di sekolah.

Dalam rangka pembangunan pendidikan di pedesaan sangatlah penting memahami karakteristik sumberdayanya. Pedesaan adalah tempat sumberdaya alam, tentunya membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang dapat mengolahnya, agar sumberdaya alam tersebut memiliki nilai guna dan nilai jual yang lebih tinggi. Dalam kaitan ini Murwatie B. Rahardjo mengemukakan:

Dalam kaitannya dengan usaha pembangunan di bidang ketenaga kerjaan, sarana kelembagaan untuk mencetak tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan antara lain adalah pendidikan sekolah, khususnya sekolah kejuruan. Lembaga pendidikan ini juga tersedia dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Apabila kita melihat lebih jauh arah pembangunan yang sedang dan akan dijalankan, maka peranan pendidikan kejuruan ini tentu akan lebih besar lagi. Hal ini bisa terjadi apabila pembangunan juga lebih jauh mengarah pada pemanfaatan sumberdaya alam berupa lingkungan fisik yang tidak hanya berskala besar... tetapi juga yang berskala kecil dan berjumlah banyak di Indonesia. Keadaan semacam ini tentu akan memerlukan tenaga-tenaga kerja dengan mutu keterampilan yang sesuai.

Pembangunan wilayah pedesaan yang memiliki sumber daya agraris harus dibangun dan dikembangkan oleh mereka yang memiliki ketrampilan sesuai dengan karakteristik agraris di pedesaan bersangkutan. Hal ini dapat dicapai melalui sekolah kejuruan yang sesuai.

Untuk mengetahui kebutuhan pendidikan di pedesaan perlu diefektifkan peranan Dewan Pendidikan yang berada di Kabupaten, karena melalui dewan pendidikan ini diharapkan dapat diketahui kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga tidak terjadi berdirinya suatu jenis sekolah sementara masyarakat tidak memerlukannya. Karena itu diperlukan peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, yang akhirnya hasil pendidikan untuk masyarakat itu sendiri, dimana lulusannya terjun langsung di masyarakat secara relevan. Mulyasa (2003 : 10) menguatkan pendapat ini:

...dunia pendidikan dituntut untuk dapat menunjang pembangunan nasional. Karena itu, dalam hal relevansi ditujukan pada keberhasilan sekolah dalam mengelola pendidikan, dengan bekerja sama dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui lulusan yang memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya.

Pernyataan di atas pada dasarnya mengarahkan bahwa pentingnya usaha pembangunan pendidikan di pedesaan yang disesuaikan dengan karakteristik pedesaan. Pembangunan sekolah-sekolah diusahakan semaksimal mungkin pada bentuk-bentuk sekolah yang mampu memberikan kemampuan kepada generasi mudanya memiliki ketrampilan-ketrampilan yang dapat memanfaatkan secara maksimal sumber-sumber daya yang terdapat di pedesaan. Jika potensi desa memiliki sumber-sumber agraris maupun kebaharian maka kesenalah keterampilan sebaiknya dikembangkan, sehingga kualitas kehidupan penduduk pedesaan menjadi lebih baik.

Pada dasarnya pendidikan dibutuhkan dan diinginkan oleh setiap individu, masyarakat, atau bangsa dimanapun. Dengan pendidikan, dalam arti pendidikan formal, semakin banyak dan tinggi pendidikan seseorang, maka semakin baik dan berkualitas diri seseorang tersebut. Dalam kaitan pentingnya bangsa yang berkualitas, tentunya diinginkan agar setiap warga negara melanjutkan pendidikan sepanjang hidup. Awalnya banyak tugas pendidikan yang dipegang oleh keluarga, tapi lambat laun beralih pada lembaga lain seperti sekolah bahkan untuk kebutuhan termasuk persiapan untuk mencari nafkah, kesehatan, agama, kesejahteraan keluarga dan sebagainya. Namun demikian, pendidikan formal tak dapat diharapkan sepenuhnya mampu menanggung transmisi keseluruhan kebudayaan bangsa. Masyarakat masih akan tetap memegang peran dan fungsi yang penting dalam pendidikan transmisi kebudayaan. Pendidikan norma-norma, sikap, adat istiadat, keterampilan sosial, dan lain-lainnya banyak diperoleh justru tidak dari sekolah, tetapi dalam keluarga masing-masing. Proses tersebut diperoleh anak terutama berkat pengalamannya dalam pergaulan dengan anggota keluarga, teman sepermainan dan kelompok primer lainnya.

Berbagai bentuk pendidikan yang muncul sejak dulu hingga kini, merupakan akibat dari sistem ekonomi sosial atau metode produksi yang berbeda-beda. Berbagai tipe masyarakat (perbudakan, kapital maupun sosial) mempunyai sistem pendidikan berbeda, namun demikian sasaran pokoknya adalah memperoleh pengetahuan. Hanya saja sasaran tersebut tidak senantiasa mencakup keseluruhan proses pendidikan keluarga, lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang memegang peranan penting.

Dalam setiap masyarakat, berbagai bentuk pendidikan yang berbeda akan memasyarakatkan dan melahirkan kembali kebudayaan. Generasi yang berkuasa selalu mewariskan ide dan teknik kepada generasi yang sedang berkembang. Sesungguhnya sebelum bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain, di pedesaan selalu mempunyai cara-cara sendiri untuk mendidik anak-anak agar kelak mampu hidup di tengah-tengah masyarakatnya sendiri. Secara tradisional

terdapat pengajaran informal yang diselenggarakan oleh keluarga atau oleh sanak saudara pada keluarga besar. Peran orangtua dan pemuka agama yang dianut masyarakat pedesaan sangat menunjang. Pendidikan jenis ini sering mempunyai isi lebih jelas dan definitif serta kurikulumnya meliputi agama, etika, latihan fisik dan latihan kerja keterampilan. Inilah yang selanjutnya disebut pendidikan masyarakat. Namun lambat laun orang-orang desa kurang menghargai pendidikan masyarakat seperti ini karena : 1) banyak orang-orang yang menggantungkan harapan kepada anak-anaknya; 2) terpengaruh oleh adanya ide-ide atau nilai-nilai baru yang masuk ke pedesaan. (Griffiths ; 1982).

Sesudah Indonesia merdeka usaha-usaha perbaikan terhadap pendidikan terus dilakukan, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pergantian kurikulum sesuai perkembangan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Berbagai upaya pelayanan dan perbaikan sistem pendidikan, terlihat banyak orangtua di pedesaan terdorong untuk menyekolahkan anak-anaknya semakin meningkat, namun demikian harus diakui pula bersamaan dengan kondisi tersebut banyak pula anak-anak yang putus sekolah dengan berbagai alasan. Untuk ini Griffit menyatakan alasan tersebut diantaranya karena : 1) kekurangan biaya atau bahkan ketiadaan biaya; 2) tuntutan ekonomi, banyak anak-anak usia sekolah yang terpaksa untuk sementara waktu membantu orangtua mengerjakan pekerjaan tertentu; 3) kurang atau terbatasnya kesadaran orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak.

Bila kita meninjau hubungan antara sistem pendidikan dengan dunia pedesaan, maka muncul beberapa fakta sebagai berikut: 1) Pendidikan umum kurang menaruh perhatian terhadap usaha untuk memerangi kelaparan maupun kepada peranan pertanian di dalam proses perkembangan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan sebagai landasan pertumbuhan secara menyeluruh dan cara untuk mencapai peningkatan itu, atau terhadap hubungan yang harus diletakkan antara industri dan pertanian dalam proses pertumbuhan dan perubahan sosial secara menyeluruh; 2) Penduduk pedesaan umumnya kurang berbeda dan berada, dan beberapa hal tingkat pendidikannya lebih rendah dibandingkan dengan warga negara biasa. Keadaan ini dimungkinkan karena berbagai kekurangan yang sudah menjadi ciri kehidupan pedesaan. Pada hakikatnya ketimpangan tersebut lebih diakibatkan oleh struktur sosial ekonomi yang tidak menguntungkan maupun karena mekanisme yang dilembagakan oleh beberapa kalangan terkemuka dalam masyarakat yang sengaja tidak mengambil tindakan untuk meningkatkan pendidikan pedesaan demi keuntungan sendiri.

Sikap negatif terhadap pendidikan tidak hanya ditunjukkan atas perbedaan masyarakat pedesaan dan kota saja. Dalam kehidupan industri dan

stratifikasi masyarakat, juga terjadi pandangan negatif pada pendidikan. Sebagaimana yang dinyatakan Schneider (1986): anak dari masyarakat strata rendah dirintangi bukan hanya oleh kurangnya sumber keuangan, tetapi juga oleh sikap negatif tertentu terhadap pendidikan. Terbukti hanya 39% saja dari kelompok mereka berkeinginan anak-anaknya melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan kelompok jabatan atau profesional hanya 35% kelompok buruh non pertanian yang berkeinginan anak-anaknya melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa individu dari kelas bawah mewarisi suatu kebudayaan yang menempatkan nilai rendah pada ide-ide abstrak, iptek atau membaca untuk berhasil dalam banyak peran jabatan. Pada individu kelas bawah cenderung mencurigai hal-hal baru, hal-hal yang belum dicoba dan merasa setiap perubahan tidak akan bermanfaat baginya. Sebaliknya pada waktu yang sama bersifat lugu dan terlalu mudah percaya, gampang dipengaruhi oleh propaganda sekalipun berlawanan dengan kepentingan mereka sendiri. Sering pula individu kelas bawah memiliki perasaan rendah diri, horisonnya terbatas dan tingkat aspirasinya rendah. Dengan demikian, kesempatan hidup individu kelas rendah mendapat rintangan dalam diri sendiri untuk mendapatkan pengetahuan umum dan informasi khusus yang akan sangat berguna untuk meningkatkan kesempatan hidupnya.

3. Tingkat Partisipasi Penduduk Asli dan Pendatang dalam Pendidikan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang

Kecamatan Blanakan secara geografis merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Subang yang wilayahnya berbatasan langsung dengan laut Jawa, sehingga pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir turut mewarnai orientasi mata pencaharaan penduduknya yang sebagian besar pada pertanian (sawah). Posisinya yang berada di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), tentunya lebih terbuka bagi mobilitas dan pergerakan manusia antar ruang yang intens di kawasan ini, sehingga memungkinkan corak pluralisme masyarakat di kawasan ini cukup menonjol. Kemajemukan yang ada tentunya memberikan pula pengaruh pada cara pandang masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pada bagaimana partisipasi mereka dibidang pendidikan.

Banyak faktor yang berpengaruh pada masalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan Blanakan dalam pendidikan, diantaranya kondisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Kondisi ekonomi sangat umum kita jumpai sebagai faktor yang dominan di berbagai daerah sebagai kendala kurangnya partisipasi dalam pendidikan. Latar belakang pendidikan maupun profesi yang berbeda, membentuk sikap hidup atau persepsi yang berbeda pula pada masyarakat dalam menilai pendidikan.

Wajar banyak masyarakat saat ini, terutama di pedesaan tidak lagi menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam hidup dan kehidupan anak-anaknya. Tidak sedikit dari mereka menganggap pendidikan tidak terlalu berpengaruh pada keberhasilan ekonomi, sehingga pendidikan adalah bukan segalanya.

Keragaman pun menjadi milik masyarakat di kecamatan Blanakan. Cara pandang atau persepsi mereka yang beragam, dimungkinkan karena karakteristik masyarakat yang beragam pula. Berdasarkan karakteristik budaya, daerah Pantura di Jawa Barat pada umumnya merupakan perpaduan antara Sunda dan Jawa. Beberapa tempat dikawasan ini berkomunikasi dalam bahasa "Jawa" dan lainnya Sunda. Namun demikian, umumnya mereka dapat berkomunikasi dan saling mengerti sekalipun digunakan salah satu dari bahasa mereka. Sehingga secara region, kawasan ini menjadi region transisi.

Berdasarkan mata pencaharian, komunitas "jawa" nampak lebih berorientasi pada laut, sedangkan komunitas berbahasa "sunda" umumnya lebih kepada pertanian sawah. Banyak masalah yang dapat diidentifikasi bertolak dari variabel ini, tetapi penelitian ini tidak diarahkan semata-mata berdasarkan perbedaan tersebut. Dalam partisipasi penduduk terhadap pendidikan, perbedaan yang terjadi nampak lebih pada perbedaan berdasarkan penduduk "asli" dan "pendatang". Penduduk asli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat yang telah turun temurun tinggal di daerah ini. Mereka umumnya memiliki lahan pertanian sendiri dan orientasi mata pencahariannya umumnya adalah petani disamping nelayan dan lainnya. Sedangkan yang dimaksud penduduk pendatang adalah anggota masyarakat yang tinggal belum terlalu lama di daerah ini dan orientasi mata pencaharian mereka umumnya pedagang, jasa dan lainnya. Sebagian besar dari mereka awalnya berdagang di daerah ini namun dikarenakan mereka sudah merasa nyaman, kemudian mereka menetap di daerah ini.

Variabel dalam penelitian ini adalah : (1) Kondisi tingkat pendidikan penduduk di Blanakan; (2) Perbedaan tingkat partisipasi penduduk asli dan pendatang dalam pendidikan anak-anak mereka; (3) Faktor-faktor dominan yang berpengaruh pada tingkat partisipasi pendidikan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk di kecamatan Blanakan. Teknik pengambilan sampelnya adalah teknik acak bertingkat (*stratified random sampling*). Pada kecamatan Blanakan terpilih desa Blanakan sebagai desa sampel. Pada desa yang terdiri dari tujuh dusun tersebut terpilih 14 hingga 15 responden dari setiap dusun yang ada, sehingga responden seluruhnya berjumlah 100 orang. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menyebarkan angket dan melakukan wawancara kepada

responden. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi dan kepustakaan. Berdasarkan hasil wawancara dari 100 responden diperoleh gambaran umum sebagai berikut:

- 1) Tingkat pendidikan responden sebagian besar berpendidikan rendah yakni 57% lulus SD dan 31% tidak tamat maupun tidak bersekolah. Sementara itu tamat SMP dan SMA masing-masing 6% dan 3%. Sedangkan yang berkesempatan berpendidikan tinggi atau sarjana 3%.
- 2) 76% responden merupakan penduduk asli atau orangtua mereka memiliki lahan pertanian sendiri dan umumnya bermatapencaharian sebagai petani. Sedangkan 24% sisanya merupakan pendatang. Tingkat partisipasi pendidikan penduduk dengan melihat tingkat pendidikan pada anak-anak mereka adalah sebagai berikut: Pada penduduk asli 24,21% tidak bersekolah, 37,89% berpendidikan SD, SMP dan SMU masing-masing 27,36% dan 9,47%, sedangkan perguruan tinggi mencapai 1,05%. Sementara itu pada penduduk pendatang : tidak bersekolah 10%, berpendidikan SD 47,5%, SMP 30%, SMA 12,5%, dan perguruan tinggi 0%.
- 3) Latar belakang penduduk baik penduduk asli dan pendatang dalam hal pekerjaan dan kondisi ekonomi atau tingkat penghasilan sebagai berikut: 63% penduduk asli bermatapencaharian petani sedangkan penduduk pendatang hanya 16,67%, sebagai buruh 7% penduduk pendatang 0%, Nelayan 6,58% adalah penduduk asli sedangkan penduduk pendatang 8,33%, pedagang penduduk asli sebanyak 11,84% sedangkan penduduk pendatang 33,33%, jasa ojek 1,32% penduduk asli dan pendatang sebanyak 12,5%. PNS sebanyak 2,63% penduduk pendatang dan penduduk pendatang sebanyak 12,5%, wiraswasta sebanyak 5,26% penduduk aslidan 12,5% penduduk pendatang, dan lain-lain 1,32% penduduk asli sedangkan penduduk pendatang sebanyak 4,17%.
- 4) Dalam hal tingkat pendapatan pada penduduk asli yang berpendapatan lebih dari 2 juta rupiah perbulan sebanyak 13,16% sementara pada penduduk pendatang 12,5%, berpendapatan antara 1-2 juta rupiah pada penduduk asli sebanyak 23,68% dan penduduk pendatang 50%, berpendapatan antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah pada penduduk asli sebanyak 32,89% dan pada penduduk pendatang 29,17%, dan berpendapatan antara 100 ribu - 500 ribu pada penduduk asli sebanyak 30,26% dan pada penduduk pendatang sebanyak 8,33%.
- 5) Bila dilihat dari lingkup daerah asal penduduk pendatang memperlihatkan sebagian besar berasal dari daerah masih dalam satu propinsi sebanyak 37%, 16,67% dalam satu kecamatan, 12,5% dalam satu desa, 25% dalam satu kabupaten, dan dari luar propinsi sebanyak 8,33%.

Besarnya angka kesempatan pendidikan penduduk hanya pada tingkat sekolah dasar (57%) ditambah tidak bersekolah (31%) secara keseluruhan berarti mencapai 88%. Ini menunjukkan sebagian besar tingkat pendidikan penduduk di desa Blanakan sangat rendah. Belum lagi jika di dikaitkan dengan Wajar dikdas 9 tahun, baru 6% saja responden usia produktif (16-45 tahun) yang berkesempatan mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, dan 3% di SMA. Tingkat pendidikan responden memang tidak langsung berpengaruh pada tingkat pendidikan anak-anaknya, akan tetapi wawasan pengetahuan dan tingkat keterampilan yang rendah tentunya cenderung memiliki peluang yang kecil dalam memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan yang memadai, terlebih jika tidak mewarisi atau memiliki lahan sebagai modal pengembangan bagi pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehari-hari maupun usaha lainnya . Kondisi ekonomi yang terbatas dapat menjadi kendala yang berarti bagi pembiayaan pendidikan anak-anaknya, sehingga faktor ini dapat menjadi faktor kuat sebagai kendala bagi kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Terbatasnya keadaan ekonomi mereka untuk membiayai pendidikan anak-anaknya bersekolah, maka mereka memilih pendidikan agama di madrasah atau pengajian di masjid-masjid sebagai penggantinya. Mereka masih memandang pendidikan agama lebih penting dari pada pendidikan di sekolah formal, di dalam menghadapi masa depan kehidupan mereka nantinya.

Terdapat gambaran yang berbeda jika kita melihat bagaimana tingkat partisipasi antara penduduk asli dan pendatang dalam pendidikan anak-anaknya. Kondisi tersebut dapat kita saksikan pada label berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan partisipasi penduduk asli dan pendatang
Dalam pendidikan anak-anaknya

No	Pendidikan Anak	Jumlah			
		Asli		Pendatang	
		F	%	F	%
1	Tidak sekolah	23	24,21	4	10
2	SD	36	37,89	19	47,5
3	SMP	26	27,36	12	30
4	SMA	9	9,47	5	12,5
5	PT	1	1,05	-	0
	Jumlah	95	100	40	100

Sumber: KKL Geografi 2005.

Data di atas menunjukkan kecenderungan yang besar pada responden penduduk asli berpartisipasi sangat rendah dalam pendidikan anak-anaknya. Hal tersebut ditunjukkan oleh 60% lebih dari mereka tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya melampaui tingkat Sekolah Dasar (SD) dan bahkan hampir

setengah dari jumlah tersebut tidak mengenyam atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) Baru 27% saja anak-anak mereka yang berhasil melampaui wajar dikdas 9 tahun, yaitu yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke tingkat SMP. Namun demikian, ada sebagian kecil anak-anak mereka mampu menyelesaikan tingkat SMU (9,47%), bahkan perguruan tinggi sebesar 1.05%. Sementara pada penduduk pendatang data diatas menunjukkan kecenderungan yang lebih baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh sekalipun relatif lebih besar pada anak-anak mereka yang mampu menyelesaikan tingkat Sekolah Dasar (SD) tetapi lebih sedikit dari anak-anak mereka yang tidak tamat SD atau pun tidak mengenyam pendidikan formal di SD. Sekalipun pada tingkat perguruan tinggi responden penduduk pendatang menunjukkan tidak terdapat anaknya yang melanjutkan perguruan tinggi, namun pada tingkat sekolah lanjutan baik SLTP atau SMP maupun SMU/SMK pada penduduk pendatang menunjukkan kecenderungan angka yang lebih besar yakni 42 % lebih. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk pendatang jauh lebih baik dalam memberikan pendidikan formal anak-anak mereka.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi angka partisipasi pendidikan pada penduduk di Desa Blanakan, diantaranya adalah latar belakang ekonomi atau tingkat penghasilan, profesi atau mata pencaharian penduduk, maupun budaya yang terdapat di masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa secara khusus perbedaan kelas, profesi dalam masyarakat dapat membentuk kebudayaan tersendiri diantara kelompok tersebut. Demikian pula dalam memandang pentingnya pendidikan, perbedaan mata pencaharian penduduk dapat berbeda pula dalam memandang pentingnya pendidikan khususnya terhadap pendidikan anak-anak mereka.

Tabel 4 menunjukkan mata pencaharian petani sangat dominan dimiliki oleh penduduk asli, sementara itu penduduk pendatang umumnya berorientasi pada mata pencaharian pedagang sekalipun cukup besar pula yang memilih petani sebagai mata pencaharian pokoknya. Selanjutnya untuk jenis pekerjaan seperti pegawai negeri sipil (PNS), wiraswasta dan jasa transportasi ojek juga cukup besar dimiliki oleh penduduk pendatang. Dengan demikian, mata pencaharian petani sangat berhubungan dengan kurangnya dukungan terhadap partisipasi dalam pendidikan anak-anak mereka. Selanjutnya jika tingkat pendapatan atau penghasilan menjadi alasan kuat bagi kurangnya dukungan untuk menyekolahkan anak-anak, mata dapat disimpulkan mata pencaharian petani kurang dapat memberikan pemenuhan kebutuhan hidup terutama untuk kepentingan pendidikan.

Tabel 4. Jenis mata pencaharian penduduk asli dan pendatang

No	Pendidikan Anak	Jumlah			
		Asli		Pendatang	
		F	%	F	%
1	Petani	48	63,16	4	16,67
2	Buruh	6	7,89	-	-
3	Nelayan	5	6,58	2	8,33
4	Pedagang	9	11,84	8	33,33
5	Jasa ojek	1	1,32	3	12,5
6	PNS	2	2,63	3	12,5
7	Wiraswasta	4	5,26	3	12,5
8	Lain-lain	1	1,32	1	4,17
	Jumlah	76	100	24	100

Sumber: KKL Geografi 2005.

Selanjutnya dapat dilihat perbandingan tingkat penghasilan antara penduduk asli dan pendatang.

Tabel 5. Penghasilan penduduk asli dan pendatang

No	Jumlah pendapatan	Jumlah			
		Asli		Pendatang	
		F	%	F	%
1	100.000 - 500.000	23	30,26	2	8,33
2	501.000 - 1.000.000	25	32,89	7	29,17
3	1.001.000 - 2.000.000	18	23,68	12	50
4	> 2.000.000	10	13,16	3	12
	Jumlah		100		100

Sumber: KKL Geografi 2005.

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendapatan relatif tinggi cenderung berada pada masyarakat atau penduduk pendatang, yang jika kita kaitkan dengan mata pencaharian mereka, umumnya dari mereka adalah non pertanian yaitu pedagang, PNS maupun usaha lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan jenis mata pencaharian non pertanian lebih memberikan pendapatan yang relatif lebih besar atau memadai dibandingkan pertanian. Ditambah umumnya dari mereka memiliki pendidikan sedikit lebih baik dari pada penduduk asli, sehingga dengan tingkat pendapatan yang relatif memadai dibandingkan umumnya penduduk asli, memudahkan mereka mengelola keuangan mereka termasuk untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya.

Sementara itu, rendahnya pendapatan para penduduk asli yang sebagian besar mata pencahariannya adalah pertanian dan rendahnya pendidikan yang dimiliki, mengakibatkan mereka kesulitan dalam mengelola keuangan mereka, termasuk untuk kepentingan pendidikan anak-anak mereka. Mereka merasa terlalu banyak kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi sebelum berpikir untuk kepentingan pendidikan. Pendidikan anak-anak mereka nampak sekali tidak menjadi prioritas utama, sehingga sangat beralasan jika tingkat partisipasi mereka dalam pendidikan relatif rendah.

Selain faktor ekonomi, pendidikan, latar belakang pekerjaan atau mata pencaharian, nampak faktor sosial budaya juga memiliki kontribusi yang berarti pada rendahnya tingkat partisipasi pendidikan anak-anak terutama pada penduduk asli di desa Blanakan. Beberapa pandangan dari sebagian besar responden menyatakan bahwa:

- 1) Biaya pendidikan saat ini teralalu tinggi untuk kemampuan ekonomi mereka;
- 2) Masih adanya pandangan pada sebagian besar penduduk bahwa "anak sebaiknya membantu orang tua bekerja di sawah, di ladang atau melaut dari pada pergi ke sekolah";
- 3) Adanya kenyataan dari sebagian besar penduduk atau anak-anak mereka yang telah mengenyam pendidikan relatif tinggi, masih banyak yang menganggur dan masih bergantung pada orangtua mereka.

Pada masyarakat pendatang, mereka memiliki pandangan yang berbeda berkenaan dengan pendidikan. Mereka merasa jauh dari sistem sosial budaya asal mereka, sehingga menganggap penting pendidikan sebagai modal utama untuk survive dan eksis di tempat baru mereka. Di Blanakan, dorongan tersebut memberikan semangat untuk menyekolahkan anak-anak mereka setinggi dan selama mungkin, sepanjang mereka mampu membiayainya. Bagi mereka anak adalah investasi, sehingga melalui sekolah yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan meneruskan orangtua.

Penduduk asli cenderung mengikuti kebiasaan yang ada pada lingkungan tempat mereka tinggal tanpa melihat bagaimana dinamika di luar lingkungannya, sehingga kemajuan-kemajuan yang terjadi di tempat lain kurang diadopsi untuk mereka miliki. Sebaliknya, masyarakat atau penduduk pendatang cenderung memiliki motivasi untuk bagaimana dapat hidup lebih baik. Kemajuan-kemajuan yang terjadi di daerah lain cepat diadopsi untuk mereka miliki, sehingga mereka pun dapat berkembang seperti yang terjadi di tempat lainnya.

4. Penutup

Sekalipun kurang signifikan, terdapat perbedaan antara penduduk asli dan pendatang pada partisipasi anak-anak mereka dalam pendidikan, terutama

dalam melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Perbedaan persepsi terhadap nilai-nilai pendidikan tidak terlepas dari latar belakang budaya mereka dimana penduduk asli yang umumnya petani masih belum terbuka dan skeptis pada pendidikan sebagai jaminan keberhasilan hidup secara ekonomi selanjutnya. Mereka umumnya masih berpandangan bahwa pendidikan bukan segalanya. Sikap hidup seperti ini tidak menjadi milik mereka penduduk pendatang. Mereka lebih meyakini ungkapan bahwa sekalipun pendidikan bukan segalanya namun untuk meraih segalanya diperlukan pendidikan. Untuk itu motivasi dari mereka jauh lebih besar dibandingkan penduduk asli dalam menyekolahkan dan melanjutkan sekolah anak-anak mereka. Namun demikian, faktor ekonomi, keterbatasan tingkat penghasilan baik pada masyarakat atau penduduk pendatang dan asli, masih merupakan kendala yang berarti dalam partisipasi pada pendidikan anak-anak mereka.

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian, dapat direkomendasikan upaya-upaya sebagai berikut : (1) Pemerintah Kabupaten hendaknya dapat membangun prasarana dan sarana transportasi yang menjangkau seluruh pelosok desa, seperti jalan-jalan desa yang menyebar merata dan angkutan umum pedesaan yang diperluas. Jasa angkutan ojek memang membantu memecahkan lapangan kerja, tetapi angkutan pedesaan dapat meringankan beban biaya transportasi termasuk untuk kepentingan anak-anak sekolah; (2) Pemerintah kabupaten atau kecamatan dan bersama masyarakat melalui komite sekolah-komite sekolah menciptakan upaya bersama memperoleh sumber-sumber pembiayaan alternatif sehingga penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak menjadikan beban yang berat bagi masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka, termasuk kemudahan bagi anak-anak putus sekolah melalui SMP Terbuka yang menjangkau semua tempat tinggal murid ; (3) Adanya gerakan-gerakan yang berkesinambungan melalui program-program di kecamatan yang berlanjut ke desa bahkan dusun serta melalui pengajian-pengajian di mesjid-mesjid untuk mengubah cara pandang menempatkan pendidikan formal sebagai sesuatu yang bernilai penting bagi kehidupan anak-anak sebagai generasi pelanjut.

Daftar Pustaka

- Laporan KKL Jurdik Geografi FPI PS UPI . (2005).
Laporan Pengolahan dan Analisis Data Hasil Sensus Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat Kabupaten Subang, Bapeda Kab. Subang (2004).
E.F Schneider. 1986. Sosiologi Industri. Aksara Persada.
2004. Pedesaan Dalam Aktivitas : Lingkungan dan Pengembangan Wilayah, Jurnal Jurdik Geografi UPI. *GEA, Vol4 No.7, April*. Bandung.